

Optimalisasi Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar

Rosita^{1*}, Ira Gustina², Novriani Susanti³, Muhammad Jalil⁴

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

*Korespondensi: rositabakri17@gmail.com

Tanggal Masuk:

18 Februari 2026

Tanggal Revisi:

08 Mei 2026

Tanggal Diterima:

04 Juni 2026

Keywords: *Education Quality; Optimization; School Operational Funds.*

How to cite (APA 6th style)

Rosita, Gustina, I., Susanti, N., & Jalil, M. (2026). Optimalisasi Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (2), 795-808.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i2.4469>

Abstract

Improvements in education quality are highly dependent on effective management of school operational funds, but many institutions face administrative and managerial obstacles that reduce the optimal utilization of funds. This study aims to examine the management of BOS funds in improving the quality of education and its impact on the quality of education at Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar. Qualitative descriptive methods were used through interviews, observations, and document analysis to examine the mechanisms of planning, implementation, and accountability. The uniqueness of this study lies in its revelation of financial management flexibility and adaptive coordination that enable the learning process to continue despite funding delays, unlike previous studies that emphasized accountability procedures. The results show that inclusive planning, organized use of funds, and transparent reporting improve learning activities, teacher development, and the learning environment. However, infrastructure limitations and administrative inefficiencies reduce funding effectiveness. This study concludes that strategic and accountable financial management supports institutional resilience and learning quality. Further research is recommended to explore integrated monitoring systems and collaborative governance models to strengthen funding sustainability and improve education quality.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pembangunan nasional mencakup dimensi fisik dan non-fisik, dengan

kebijakan pembangunan non-fisik yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat layanan pendidikan melalui penyediaan pendanaan berbasis satuan pendidikan, salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara regulatif diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler (Permendikbud, 2021). Selain itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Salah satu yang tidak dapat ditinggalkan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan unsur krusial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yang dialokasikan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan pendidikan. Dalam sistem pembiayaan pendidikan, isu-isu utama meliputi pemenuhan kebutuhan investasi, operasional sekolah, gaji pendidik, serta perlindungan hak masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah atas pendidikan berkualitas. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang dirancang untuk mendukung penyediaan dana operasional non-personel di lembaga pendidikan. Program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan Pendidikan Dasar Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang berkaitan erat dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2014, yang mendefinisikan BOS sebagai program pemerintah untuk menyediakan dana operasional non-personel bagi unit pendidikan dasar sebagai bagian dari program pendidikan wajib (Rahayuningsih, 2021).

Dilansir dari website <https://sumut.kemenag.go.id/> (2025), Pemerintah melalui Kemenag terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan melakukan penyaluran Dana BOS / BOP RA secara massif. Tahun 2025 tercatat tersedia anggaran total sekitar Rp 4,01 triliun yang akan disalurkan kepada lebih dari 81 ribu lembaga madrasah dan RA yang telah lolos verifikasi. Dana BOS ini dirancang untuk mendukung operasional madrasah, termasuk pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan kegiatan belajar-mengajar, serta kebutuhan operasional lainnya agar layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Pelaksanaan program BOS diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah untuk mengelola dana yang diterima secara optimal, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun akuntabilitas, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala di sejumlah sekolah dan madrasah, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana BOS di tingkat madrasah MA Miftahul Huda masih terdapat berbagai kendala administratif dan manajerial yang berdampak pada efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala madrasah, “Pada tahun 2024, pencairan dana BOS di madrasah kami memang mengalami keterlambatan. Seharusnya dana diterima pada bulan Maret, namun baru terealisasi pada bulan April karena adanya data administratif yang belum lengkap di sistem EMIS. Hal ini cukup berdampak pada pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Selain itu, meskipun jumlah dana BOS yang kami terima cukup besar, dalam pengelolaannya masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi perencanaan maupun manajemen. Kami juga berupaya menyesuaikan penggunaan dana sesuai dengan pedoman teknis, termasuk alokasi untuk santri dan infrastruktur. Namun, pada praktiknya, kebutuhan madrasah yang cukup banyak membuat fasilitas yang ada masih belum sepenuhnya memadai.”

Oleh karena itu, meskipun kebijakan dan anggaran BOS dirancang secara nasional dalam skala besar dan didistribusikan ke berbagai lembaga madrasah, di tingkat madrasah, seperti MA Miftahul Huda Sungai Luar, masih terdapat hambatan baik administratif maupun manajerial yang menghalangi optimalisasi dana BOS untuk secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi dana BOS di madrasah, serta mengevaluasi tingkat efektivitas penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan aslinya, sehingga manfaat konkret berupa peningkatan fasilitas, layanan, dan kualitas pendidikan dapat terwujud. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kelemahan infrastruktur, sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan, kualitas calon peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran dan manajemen kelembagaan. Menurut Aziz (2015), Pendirian sekolah oleh masyarakat seringkali tidak mempertimbangkan aspek kualitas layanan pendidikan. Madrasah memiliki landasan sosial yang menjadikannya luar biasa tangguh dalam menghadapi persaingan global. Inisiatif seperti ini patut diapresiasi, namun kenyataannya upaya peningkatan mutu sekolah lebih sulit dilakukan karena berbagai kelemahan, terutama di sekolah swasta. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Mawarti et al., (2025), menunjukkan pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rakha Amuntai belum optimal, dengan ketidaksesuaian perencanaan terhadap petunjuk teknis, terutama alokasi untuk honorarium guru honorer, ekstrakurikuler, dan tahfiz malam. Pengorganisasian menghadapi kendala beban tugas ganda pada sumber daya manusia, meskipun fasilitas seperti perangkat dan internet tersedia. Kepemimpinan menjalankan monitoring dan arahan berkala dengan baik, sedangkan pengendalian melibatkan evaluasi dan musyawarah, namun tidak semua rencana anggaran terealisasi efektif.

Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur ini sangat memengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan oleh organisasi. Pembahasan ini menyoroti aspek menarik dari penelitian ini langkah-langkah yang diterapkan oleh MA Miftahul Huda Sungai Luar melalui keterlibatan berbagai unsur sekolah dalam pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan menekankan penerapan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian, MA Miftahul Huda telah berhasil mempertahankan kredibilitasnya sebagai madrasah terkemuka dengan fondasi yang kokoh dalam manajemen keuangan, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pembahasan di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk mengembangkan studi lebih lanjut mengenai optimalisasi pendanaan pendidikan melalui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna meningkatkan kualitas pendidikan di MA Miftahul Huda Sungai Luar.

Dengan Demikian, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar. Penelitian ini bermanfaat bagi orang tua siswa dengan harapan dapat memperkaya pemahaman mereka mengenai penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait alokasi dana BOS. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS serta kualitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi acuan bagi penelitian lanjutan mengenai pengelolaan dana BOS serta peningkatan kualitas pendidikan.

REVIU LITERATUR

Pedoman Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS

Akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan merujuk pada kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan sesuai regulasi yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup aspek pelaporan, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar kinerja. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2008). Dalam konteks dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akuntabilitas menjadi prinsip utama untuk memastikan penggunaan dana sesuai perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik (Liniarti & Nasution, 2022). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan kepercayaan antara pengelola dana (agent) dan pemberi amanah (principal) (Liniarti & Nasution, 2022).

Pembiayaan Pendidikan

Bond & Sharon (2009) menyatakan bahwa Pembiayaan pendidikan merupakan faktor strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan langsung dengan efisiensi dan efektivitas organisasi pendidikan. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2008, pembiayaan pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan biaya pribadi peserta didik. Ketersediaan sumber daya finansial yang memadai memungkinkan lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kualitas sarana prasarana, serta mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu biaya untuk lembaga pendidikan, biaya untuk administrasi atau pengelolaan pendidikan, dan pengeluaran pribadi siswa.

1. Biaya Satuan Pendidikan
 - a. Biaya investasi, yang mencakup biaya untuk lahan pendidikan dan biaya untuk lahan non-pendidikan.
 - b. Biaya operasional, yang terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia
 - c. Bantuan pendidikan, berupa dana pendidikan yang dialokasikan kepada siswa karena orang tua atau wali mereka tidak mampu membiayai pengeluaran pendidikan.
 - d. Beasiswa, yaitu bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa berdasarkan prestasi akademik mereka.
2. Biaya Administrasi atau Manajemen Pendidikan, yang mencakup pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
3. Biaya Pribadi Siswa, yaitu biaya pribadi yang harus ditanggung oleh siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan (Aida Karimah PS, 2024).

Mutu pendidikan tidak lepas dari sumber daya finansial. Biaya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Operasi yang dilakukan dengan biaya yang relatif rendah namun menghasilkan produk yang berkualitas dianggap efisien dan efektif. Dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, keuangan memegang peranan sentral dalam kemajuan pendidikan. Dengan dukungan finansial, seluruh aspek yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Dengan dukungan finansial yang memadai, lembaga pendidikan

dapat berkembang dengan lancar dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan mendukung pembiayaan operasional non-personalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaannya diatur dalam pedoman teknis yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Permendikbud, 2021). Secara konseptual, dana BOS berfungsi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penyediaan sumber daya pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta dukungan terhadap kegiatan akademik. Oleh karena itu, efektivitas dana BOS sangat bergantung pada kualitas manajemen di tingkat sekolah.

Education Management Information System (Emis)

Berdasarkan KMA Nomor 83 tahun 2022 EMIS merupakan sistem informasi pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk mendukung pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi. Keakuratan data dalam EMIS menjadi prasyarat penting dalam penyaluran dana BOS dan pengambilan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, EMIS berperan sebagai instrumen pendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Pendidikan (Kemenag, 2022).

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan menuntut penerapan manajemen keuangan yang sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menekankan partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Efektivitas pengelolaan keuangan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menyusun prioritas, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan (Mulyasa, (2011). Tiga perspektif berbeda diterapkan dalam penyusunan anggaran: 1) Pendekatan perbandingan, yang membandingkan jumlah pengeluaran dan pendapatan untuk setiap bagian anggaran setiap tahun; 2) Evaluasi Anggaran Rencana Program, yang menekankan perencanaan program spesifik dan umum serta target; dan 3) Pendekatan Fungsional, yang mengevaluasi anggaran antara pelaksanaan dan dana perencanaan menggunakan analisis anggaran berbasis nol. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Optimalisasi Mutu Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, kualitas pendidikan adalah tingkat kecerdasan nasional yang dicapai melalui sistem pendidikan nasional, yang mencakup keunggulan akademik, teknis-vokasional, dan profesional, serta kompetensi profesional, pribadi, sosial, karakter, moral, dan etika sebagai dasar keterampilan hidup. Sudrajat menambahkan bahwa pendidikan berkualitas menghasilkan “manusia yang sempurna” yang mengintegrasikan iman, pengetahuan, kedermawanan, teknologi, dan ketakwaan.

Indikator mutu pendidikan meliputi tiga aspek utama: input (visi, misi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan lingkungan sekolah yang mendukung etos kerja tinggi); proses (suasana belajar aktif, kondusif, dan kreatif dengan partisipasi semua pihak, didukung materi ajar, metodologi, kurikulum, dan manajemen berkualitas); serta hasil (prestasi akademis seperti ujian, non-akademis seperti olahraga atau seni, serta aspek abstrak seperti disiplin, kebersihan,

dan akreditasi sekolah). Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus terus dilakukan. Standar kualitas pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, yang mencakup delapan standar pendidikan nasional yakni kompetensi lulusan, konten, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas dan infrastruktur, manajemen, pembiayaan, serta penilaian yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kualitas pendidikan secara holistik.

Dari perspektif ini, kualitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas proses transformasi sikap (baik atau buruk) dan perilaku individu atau kelompok menuju kedewasaan manusia yang mendekatkan mereka kepada Tuhan melalui bimbingan dan pelatihan. Kualitas pendidikan mencakup aspek input dan output; input dianggap berkualitas tinggi jika siap untuk diproses, sedangkan proses dianggap berkualitas tinggi jika menghasilkan lulusan yang kompeten (Setiawan et al., 2021).

Hubungan Dana BOS dan Kualitas Mutu Pendidikan

Dana Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan korelasi yang signifikan dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena dana ini menjadi sumber pendanaan utama untuk biaya non-personel di unit pendidikan, yang secara langsung mendukung implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di MA Miftahul Huda Sungai Luar, dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar (KBM), pengadaan bahan ajar, peralatan belajar seperti proyektor, pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi pendidik, yang semuanya berkontribusi dalam memenuhi standar pendidik dan pendidikan, standar proses, serta standar fasilitas dan infrastruktur berdasarkan PP No. 57 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler menekankan bahwa penggunaan dana ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, misalnya melalui penyediaan buku teks, peralatan laboratorium, dan media pembelajaran yang mendukung lingkungan belajar yang aktif dan kondusif.

Oleh karena itu, dana BOS tidak hanya mengurangi biaya operasional sekolah, tetapi juga memberikan dukungan keuangan yang esensial untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi, termasuk pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan lingkungan belajar. Namun, efektivitas hubungan ini bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel, di mana keterlambatan penyaluran dana akibat data EMIS yang tidak lengkap (KMA Nomor 83 Tahun 2022) dapat menghambat optimalisasi kualitas. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian internal perlu diperkuat untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi siswa dari latar belakang kurang mampu.

Berdasarkan hasil penelitian Setiawan et al., (2021), Dampak dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tercermin dalam peningkatan hasil belajar siswa, sebagaimana dibuktikan oleh prestasi akademik mereka. Prestasi-prestasi ini dapat tercapai berkat ketersediaan fasilitas belajar yang memadai, yang membantu memotivasi siswa dan mendorong semangat belajar mereka. Selain itu, penyaluran dana BOS ke madrasah turut berkontribusi terhadap peningkatan motivasi guru. Begitu juga dengan hasil penelitian oleh Lestari & Qarni (2022), Pelaksanaan Bantuan Fungsional untuk Madrasah di Wilayah Dinas Agama Sumatera Utara dapat berhasil dengan berfokus pada pendekatan berbasis aset, yang mencakup perencanaan terkait program pengembangan profesional bagi guru, pengembangan lebih lanjut infrastruktur dan kerangka kerja sekolah, serta penyusunan proyek pembelajaran. Perspektif berikutnya dilihat dari pendekatan siklus yang berkaitan dengan metode atau teknik alokasi dana cadangan BOS, pelaksanaan dan evaluasi program, dan akhirnya, dari pendekatan

berorientasi tujuan. Dalam situasi ini, Kantor Wilayah Urusan Agama Sumatera Utara perlu secara komprehensif mengarahkan evaluasi pemanfaatan dana cadangan BOS, khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri, sehingga pengelolaan aset BOS dapat berjalan dengan baik dan benar di masa mendatang. Begitu juga penelitian oleh Aida Karimah PS, (2024), berdasarkan hasil analisis mutu pendidikan, pendidikan mempunyai korelasi dengan pengelolaan keuangan, yang mana pengelolaan keuangan pendidikan mempunyai kemampuan dalam merencanakan program dan kebijakan untuk mendukung 'peningkatan mutu'. Pendanaan yang dikelola dengan baik antara lain mendukung pembelajaran, meningkatkan inovasi dan produk madrasah yang berkualitas, mencapai hasil pembelajaran akademik atau non-akademik, sekaligus mencapai penilaian yang membantu menghasilkan siswa yang berkualitas.

Sedangkan hasil penelitian oleh Mawarti et al., (2025) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rakha Amuntai belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek perencanaan, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, khususnya dalam alokasi dana untuk honorarium guru honorer, termasuk kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler dan tahfiz malam. Dari segi pengorganisasian, sumber daya manusia mengalami kendala akibat beban tugas ganda, meskipun fasilitas pendukung seperti perangkat dan koneksi internet telah tersedia. Dalam hal kepemimpinan, pelaksanaan monitoring dan pemberian arahan telah berjalan baik secara berkala. Sementara itu, aspek pengendalian menunjukkan adanya evaluasi dan tindak lanjut melalui musyawarah, meskipun tidak semua rencana anggaran terealisasi secara efektif.

Faktor-Faktor Optimalisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Perencanaan Strategis Berbasis Kebutuhan, Perencanaan yang dirancang secara strategis berdasarkan data empiris aktual sekolah dan prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guna memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran
2. Kapasitas Manajemen Keuangan, Penguatan kapasitas kelembagaan sekolah dalam administrasi keuangan, pelaporan yang akuntabel, dan mekanisme pengendalian anggaran yang ketat untuk meminimalkan risiko penyimpangan
3. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah, Peran kepala sekolah sebagai pemimpin visioner yang mampu mengarahkan penggunaan dana secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi
4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan terkait pengelolaan dana kepada semua pemangku kepentingan, yang memperkuat kepercayaan dan pengawasan eksternal.
5. Efisiensi dalam Pencairan dan Penggunaan Dana, Optimalisasi proses pencairan dan penggunaan dana untuk memastikan pelaksanaan program sekolah yang lancar dan tepat waktu, sehingga mengurangi hambatan operasional.
6. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Internal, Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi internal yang komprehensif, bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian penggunaan dana dengan indikator objektif yang telah ditetapkan.
7. Fokus pada Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Penekanan utama alokasi dana pada penguatan kualitas proses pembelajaran

Optimalisasi dana BOS di Madrasah Aliyah (MA) bergantung pada perencanaan strategis berbasis data riil, kapasitas tata kelola keuangan yang akuntabel, kepemimpinan visioner kepala sekolah, transparansi publik, efisiensi pencairan, pengawasan internal, serta fokus pada mutu pembelajaran (Syata et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat pasca-positivisme, yang digunakan untuk mengkaji fenomena alamiah (berbeda dengan metode eksperimental), dengan peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data melalui triangulasi (kombinasi teknik), analisis data induktif atau kualitatif, serta temuan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman makna dan konstruksi fenomena daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Sumber data diperoleh melalui dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahap secara bersamaan, yaitu reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018). Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda, yang berlokasi di Parit Penghulu Jantan No. 03, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Informan kunci meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, dan Petugas Pelaksana Teknis (PPTK) atau Operator.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara, pada penelitian ini dilakukan wawancara semi terstruktur, dan bersifat fleksibel dalam menjawab pertanyaan tetapi terkontrol oleh peneliti berdasarkan tema wawancara. Maka agar mendapatkan informasi secara maksimal, peneliti menentukan beberapa narasumber untuk mendukung penelitian mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
 - b. Bendahara Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
 - d. Operator Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar.
2. Observasi, Penelitian ini menggunakan metode pengamatan partisipatif, di mana peneliti secara aktif ikut serta dalam kegiatan sehari-hari subjek pengamatan atau sumber data. Selama proses pengamatan, peneliti juga melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh sumber data. Pendekatan pengamatan partisipatif ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan mendalam, termasuk pemahaman akan makna di balik setiap perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, pengamatan difokuskan pada:
 - a. Lingkungan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
 - b. Kegiatan Siswa Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
 - c. Proses pembiayaan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar;
3. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dokumen-dokumen sekolah yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk laporan mengenai jumlah siswa yang menerima dana tersebut, alokasi dana BOS, laporan pertanggungjawaban, serta indikator kualitas pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Miftahul Huda merupakan lembaga pendidikan menengah berbasis Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Arraudah Indragiri dan berlokasi di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Madrasah ini dipimpin oleh Drs. Zainuddin dengan status terakreditasi B (2024–2029). MA Miftahul Huda terletak di atas lahan wakaf seluas sekitar 11.950 m² dengan luas bangunan sekitar 1.600 m². Sekolah ini telah mempertahankan jumlah siswa yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir, dengan total sekitar 118–128 siswa yang terbagi ke dalam 6 kelas. tenaga pengajar terutama terdiri dari 15 guru kontrak, yang didukung oleh tenaga non-pengajar seperti staf administrasi dan petugas kebersihan sekolah.

Fasilitas dan infrastruktur madrasah masih relatif terbatas. Meskipun beberapa fasilitas penting, seperti ruang kelas, sudah tersedia, banyak di antaranya yang kondisinya kurang baik, dan saat ini belum ada laboratorium sains, perpustakaan, atau ruang pendukung lainnya. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, laboratorium komputer, ruang shalat, dan fasilitas sanitasi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun madrasah telah memiliki infrastruktur dasar untuk menyelenggarakan pendidikan, perbaikan fasilitas masih diperlukan guna mendukung kualitas pembelajaran yang optimal.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah, bendahara, PPTK, dan operator; observasi partisipatif terhadap proses pengelolaan dana BOS, aktivitas pembelajaran, dan lingkungan madrasah; serta analisis dokumen (RKAM 2024/2025, laporan keuangan BOS, dan bukti pengeluaran), pengelolaan dana BOS di MA Miftahul Huda Sungai Luar telah dioptimalkan melalui pendekatan partisipatif, meskipun dibatasi oleh keterlambatan pencairan dan kendala administratif. Temuan utama diinterpretasikan sesuai Permendikbud No. 6/2021 tentang Pedoman Teknis BOS dan PP No. 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menekankan akuntabilitas stakeholder dalam pengelolaan sumber daya publik. Berikut ini akan menjelaskan pengelolaan dana BOS dan implementasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MA Miftahul Huda Sungai Luar:

Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan triangulasi data, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda Sungai Luar telah dilakukan melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip partisipatif. Namun, perencanaan ini tidak sepenuhnya adaptif terhadap kendala pencairan dana, sehingga mengakibatkan pelaksanaan program yang kurang optimal. Selama tahap pelaksanaan, alokasi dana BOS difokuskan pada kegiatan pembelajaran, honorarium guru kontrak, dan operasional sekolah sesuai dengan pedoman teknis (juknis). Temuan utama mengungkapkan penggunaan dana talangan akibat keterlambatan pencairan yang disebabkan oleh hambatan administratif pada sistem EMIS. Fenomena ini menandakan fleksibilitas dalam pengelolaan, sekaligus menyoroti keterbatasan stabilitas keuangan dan perencanaan.

Dalam hal pelaporan, madrasah telah menerapkan sistem e-RKAM bersamaan dengan laporan manual yang didukung oleh bukti fisik, yang menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Namun, koordinasi internal yang belum optimal mengindikasikan bahwa akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum mencapai efektivitas manajerial yang sepenuhnya. Secara keseluruhan, dana BOS berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, dan mendukung kegiatan sekolah, yang pada akhirnya mendukung kualitas pendidikan. Namun, keterbatasan dalam infrastruktur dan manajemen berarti bahwa kontribusi ini belum optimal, sehingga peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terwujud.

Pengelolaan Dana BOS Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Penerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendukung kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, khususnya terkait standar tenaga pendidik, standar proses, serta standar sarana dan prasarana. Dalam konteks standar guru, alokasi dana untuk program pelatihan

mencerminkan komitmen terhadap pengembangan kompetensi; namun, efektivitasnya belum optimal karena pengaruh faktor sumber daya manusia internal. Mengenai standar proses, penggunaan dana BOS untuk pembelajaran aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Meskipun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung dan kemampuan guru, sehingga peran dana BOS lebih menonjol sebagai elemen pendukung daripada penentu utama kualitas pembelajaran.

Berkenaan dengan standar fasilitas dan infrastruktur, dana BOS dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengadaan fasilitas, yang telah menghasilkan sejumlah perbaikan. Namun, keterbatasan anggaran telah menghambat terpenuhinya standar-standar tersebut secara menyeluruh, sehingga infrastruktur tetap menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, dana BOS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, termasuk perencanaan yang adaptif, koordinasi internal yang kuat, serta penguatan mekanisme pengawasan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung proses pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perencanaan anggaran yang sistematis melalui RKAM.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Dana BOS telah dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Penyusunan dilakukan secara berkala melalui rapat tahunan, bulanan, dan triwulanan dengan melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, serta komite madrasah. Perencanaan juga didasarkan pada analisis kebutuhan dan skala prioritas program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mawarti dkk. yang menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS yang baik ditunjukkan oleh adanya perencanaan yang tertata dan berbasis kebutuhan madrasah. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan yang sistematis merupakan faktor utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana BOS.

2) Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan dana BOS (partisipatif)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS melibatkan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, guru, operator, komite, hingga orang tua siswa. Keterlibatan ini mencerminkan adanya prinsip transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan madrasah. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian Mawarti dkk. yang menyebutkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan adanya keterlibatan pihak terkait dalam proses pengelolaan. Dengan demikian, partisipasi stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.

3) Pengalokasian dana BOS untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Dana BOS di Madrasah Aliyah Miftahul Huda dialokasikan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan, seperti pelatihan guru (MGMP, workshop), pengadaan media dan bahan ajar, serta kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sejalan dengan penelitian Mawarti dkk. yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS yang diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran merupakan indikator bahwa pengelolaan dana telah berjalan cukup baik. Dengan demikian, alokasi yang tepat sasaran menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan.

4) Adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang baik

Pengendalian dilakukan melalui verifikasi RKAM, pemantauan penggunaan dana, serta pelaporan melalui aplikasi e-RKAM dan laporan fisik. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh komite madrasah dan Kementerian Agama. Temuan ini relevan dengan penelitian Mawarti dkk. yang menyatakan bahwa adanya pengawasan dari pihak terkait merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan dana BOS. Dengan adanya pengawasan yang baik, penggunaan dana dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan ketentuan.

5) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana BOS

Penggunaan aplikasi seperti EMIS dan e-RKAM membantu dalam proses pengelolaan data dan pelaporan dana BOS secara lebih efektif dan transparan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Mawarti dkk. yang menyebutkan bahwa sistem pelaporan berbasis aplikasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana BOS, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis

Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan, terdapat ketidaksesuaian antara RKAM dengan realisasi, terutama pada pembiayaan honor guru yang melebihi anggaran. Temuan ini relevan dengan penelitian Mawarti dkk. yang menemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana BOS dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik belum sepenuhnya menjamin kesesuaian dalam implementasi.
- 2) Dominasi penggunaan dana untuk honor guru. Penggunaan dana BOS yang cukup besar untuk pembayaran honor guru menjadi salah satu kendala karena mengurangi proporsi anggaran untuk kebutuhan lain. Hal ini sejalan dengan temuan Mawarti dkk. yang menyatakan bahwa alokasi dana yang dominan untuk honorarium guru honorer menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan dana BOS.
- 3) Beban kerja operator yang tinggi (multitugas). Operator madrasah memiliki beban kerja yang tinggi karena tidak hanya mengelola administrasi BOS tetapi juga memiliki tugas lain. Temuan ini relevan dengan penelitian Mawarti dkk. yang mengungkapkan adanya beban kerja berlebih pada pengelola BOS yang berdampak pada efektivitas pengelolaan.
- 4) Kendala teknis pada aplikasi (EMIS dan e-RKAM). Gangguan teknis seperti error atau lambatnya akses aplikasi menjadi hambatan dalam proses pelaporan dana BOS. Hal ini sejalan dengan penelitian Mawarti dkk. yang menyebutkan bahwa kendala teknis dalam aplikasi pelaporan (EDM/e-RKAM) menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan dana BOS.
- 5) Rendahnya partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesional. Tidak semua guru aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP, sehingga berdampak pada optimalisasi penggunaan dana BOS dalam peningkatan kompetensi guru. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Mawarti dkk. yang menyatakan bahwa kurangnya partisipasi guru dalam kegiatan MGMP/KKG menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana BOS.

Evaluasi Pembahasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar secara konseptual telah mengikuti siklus manajemen keuangan pendidikan, mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Meskipun

demikian, analisis mendalam atas temuan wawancara mengungkap adanya disparitas antara kerangka normatif perencanaan dan realisasi implementasi lapangan Aspek Perencanaan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) telah dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan kepala madrasah, bendahara BOS, guru, dan komite madrasah, dengan penetapan program yang berbasis kebutuhan aktual serta rekomendasi Rapor Pendidikan. Namun, keterlambatan pencairan dana BOS akibat ketidaklengkapan data pada sistem EMIS menandakan kurangnya kematangan administratif dalam perencanaan. Fenomena ini mengganggu eksekusi program yang telah direncanakan, sehingga menjadikan efektivitas perencanaan bersifat kondisional. Hal tersebut mencerminkan ketidakadaptifan perencanaan terhadap risiko teknis-administratif, khususnya integrasi platform digital seperti EMIS.

Aspek Pengorganisasian. Struktur pengelolaan dana BOS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala madrasah, bendahara, operator, guru, dan komite, yang selaras dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Meski demikian, distribusi beban kerja pada sumber daya manusia yang terbatas berpotensi menimbulkan inefisiensi, terutama akibat tugas administratif tambahan seperti penginputan data EMIS dan pelaporan e-RKAM. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mawarti et al., 2025) yang mengidentifikasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan beban kerja ganda sebagai hambatan utama pengelolaan dana BOS.

Aspek Pelaksanaan. Alokasi dana BOS difokuskan pada dukungan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, dan operasional rutin, yang secara umum sesuai dengan petunjuk teknis dan berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Akan tetapi, deviasi realisasi anggaran dari rencana awal seperti eskalasi biaya honor guru—menunjukkan fleksibilitas tinggi, sekaligus kelemahan kontrol konsistensi anggaran. Selain itu, ketidakcukupan dana relatif terhadap kebutuhan madrasah menghambat optimalisasi fasilitas pendidikan, sebagaimana tercermin dalam temuan empiris.

Aspek Pengendalian. Mekanisme pengawasan mencakup monitoring internal, pelaporan periodik via aplikasi e-RKAM, serta supervisi eksternal oleh Kementerian Agama dan komite madrasah, yang mendukung akuntabilitas dan transparansi. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kendala teknis seperti gangguan sistem dan keterlambatan input data, yang memengaruhi verifikasi dan pencairan dana. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian bergantung tidak hanya pada prosedur formal, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur informasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di MA Miftahul Huda Sungai Luar menunjukkan performa struktural yang memadai, tetapi fungsionalitasnya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi ketergantungan pada EMIS, keterlambatan pencairan, dan keterbatasan sumber daya manusia, yang mengurangi kontribusi dana terhadap peningkatan mutu pendidikan. Temuan ini memperkuat argument (Setiawan et al., 2021) dan (Lestari & Qarni, 2022) yang menekankan bahwa efektivitas dana BOS ditentukan oleh kualitas manajemen dan dukungan sistem. Oleh karena itu, optimalisasi memerlukan penguatan kapasitas manajerial, integrasi sistem informasi yang robust, serta perencanaan adaptif terhadap dinamika kebutuhan dan risiko lapangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar secara umum telah mengikuti siklus manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pada dimensi perencanaan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Madrasah (RKAM) telah bersifat partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan madrasah, meskipun terkendala oleh isu administrative khususnya ketergantungan pada sistem EMIS yang menyebabkan penundaan pencairan dana. Dalam pengorganisasian, mobilisasi sumber daya manusia telah relatif memadai, tetapi belum optimal karena beban kerja ganda dan keterbatasan kompetensi pengelola.

Pada pelaksanaan, dana BOS dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan operasional madrasah; namun, ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan rencana menandakan kelemahan pengendalian fiskal. Sementara itu, pengendalian didukung oleh mekanisme pengawasan dan pelaporan via e-RKAM serta monitoring internal-eksternal, meskipun efektivitasnya terhambat oleh hambatan teknis dan administratif. Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di institusi tersebut dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Penyebab utama mencakup kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia, dan integrasi sistem informasi yang sub-optimal. Oleh karenanya, rekomendasi mencakup penguatan perencanaan berbasis data akurat, peningkatan kapasitas pengelola, serta optimalisasi infrastruktur informasi guna mewujudkan pengelolaan dana BOS yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif di satu lokasi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi; sumber data terbatas pada informan internal, observasi, dan dokumentasi tanpa perspektif eksternal mendalam; waktu penelitian terbatas pada tahun 2024-2025, menghambat evaluasi dampak jangka panjang; serta kendala administratif seperti keterlambatan pencairan dana berpotensi mempengaruhi validitas data meskipun diatasi triangulasi.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan penelitian lanjutan dengan pendekatan campuran untuk survei skala besar mengukur dampak dana BOS; perluasan cakupan ke madrasah lain untuk studi komparatif; penelitian longitudinal untuk evaluasi jangka panjang dan penguatan EMIS; serta fokus pada optimalisasi alokasi dana untuk infrastruktur atau sumber daya manusia guna rekomendasi kebijakan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Karimah PS, W. G. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Dana Bos Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah. *Digdaya*, 1(1), 31–38. <https://digdaya.ahadpublishing.com/index.php/journal/article/view/6%0Ahttps://digdaya.ahadpublishing.com/index.php/journal/article/download/6/4>
- Aziz, A. Z. (2015). Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *El-Tarbawi*, 8(1), 69–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5>
- Bond, Sharon, M. H. (2009). *The Cost of a Free Education. Australia: Brotherhood of St Laurence*.
- Kemenag. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Pada Kementerian Agama*.
- Lestari, L., & Qarni, W. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

- Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2022). Operasional Sekolah (Bos) Dalam Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(6), 275–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jpm>
- Mawarti, Maryati, A., & Salmiyati. (2025). *Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rakha Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 7(1), 364–373. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad>
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. E. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1. (2013). In *Sekretariat Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. (2008).
- Permendikbud. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 58(12), 7250–7257.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Management of School Operational Assistance Funds (BOS). *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10128>
- Setiawan, A. S., Basuki, I., & Roesminingsih, E. (2021). Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 442–447. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2224>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Syata, W. M., Sabillah, B. M., Subur, H., & Lewa, M. J. (2024). *Optimalisasi Media Digital Dalam Pembelajaran Ekonomi*. 9(2), 22–27.
<https://sumut.kemenag.go.id/beranda/singgle-post/rp4-triliun-bos-madrasah-dan-bop-ra-2025-cair-pekan-ini>, diakses pada: 23 November 2025